

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADABKAD TAPANULI UTARA

¹Anna Canria Siburian, ²Mulatua Pandapotan Silalahi, ³Arison Nainggolan

Prodi Akuntansi, Universitas Methodist Indonesia

email: annacanriasiburian@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the influence of budget planning, budget execution, and the procurement process of goods and services on budget absorption. The methodology applied in this study uses a descriptive approach, with the population consisting of employees of the North Tapanuli Regional Finance and Assets Agency. The sample was taken using purposive sampling technique. Data were collected through the distribution of questionnaires and library research. Data analysis was conducted using multiple linear regression. The results of the empirical analysis indicate that the three independent variables, namely budget planning, budget execution, and the procurement process of goods and services have a positive and significant influence on budget absorption, both when tested simultaneously and partially. The coefficient of determination shows that the three variables are able to explain 41.2% of the budget absorption variable, while the remaining 58.8% is influenced by other variables not included in this study.

Keywords: Budget Planning, Budget Implementation, Goods and Services Procurement Process, Budget Absorption.

Abstrak

Studi ini memiliki tujuan untuk mengkaji pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran. Metodologi yang diterapkan dalam studi ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan populasi terdiri dari pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Tapanuli Utara. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis empiris mengindikasikan bahwa ketiga variabel bebas yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta proses pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, baik ketika diuji secara simultan maupun parsial. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 41,2% variabel penyerapan anggaran, sementara sisanya sebesar 58,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata kunci : Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Penyerapan Anggaran.

PENDAHULUAN

Anggaran merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang memiliki fungsi penting dalam mendorong pertumbuhan, menjaga kestabilan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan sebagai bagian dari upaya pemerintah mencapai tujuan pembangunannya. Dokumen keuangan negara merupakan catatan yang merefleksikan kondisi finansial institusi dan memuat rincian pemasukan, pembelanjaan, serta aktivitas yang dijalankan. Di dalamnya terkandung proyeksi terkait langkah-langkah yang

akan ditempuh oleh institusi tersebut. Semakin baik anggaran pemerintah, maka akan membawa dampak positif bagi berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Silalahi, 2021).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019, disebutkan Pengeluaran pemerintah tingkat daerah dialokasikan untuk mendanai implementasi tugas-tugas pemerintahan yang berada dalam lingkup otoritas daerah dan menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan, serta harus menjangkau tercapainya sasaran

pembangunan prioritas di tingkat nasional. Dalam perspektif ini, pemanfaatan anggaran daerah perlu lebih diarahkan pada aktivitas yang berfokus pada produktivitas dan memberikan dampak positif terhadap pengembangan kualitas SDM, layanan untuk masyarakat, dan kemajuan ekonomi lokal. Persentase pengeluaran tersebut sebaiknya dapat direalisasikan lebih dini untuk memastikan dampak optimal pada perkembangan ekonomi dan peningkatan mutu layanan kepada masyarakat dapat terwujud secara maksimal.

Akhir-akhir ini tingkat penyerapan anggaran pemerintah pusat dan daerah sering kali menjadi perbincangan utama di kalangan pengamat ekonomi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Kegagalan dalam mencapai sasaran penganggaran mengindikasikan bahwa keuntungan dari pembelanjaan tersebut tidak terealisasi karena sebagian dana yang telah dialokasikan tidak dapat dimanfaatkan secara efisien oleh lembaga pemerintah, yang mengakibatkan adanya sejumlah anggaran yang tetap menganggur atau tidak termanfaatkan. Problematika realisasi anggaran merupakan kejadian yang berkelanjutan dan berulang baik dalam lingkup kementerian/lembaga maupun di tingkat unit pelaksana teknis (satker) di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya implementasi berbagai program dan aktivitas yang dijalankan oleh satker maupun pemerintah daerah. Suatu kendala dalam pemanfaatan alokasi dana di instansi pemerintahan pusat/daerah adalah ketidaktercapaian sasaran penyerapan anggaran. Pada mayoritas unit kerja, tingkat konsumsi anggaran cenderung minim di periode awal tahun fiskal, lalu bertambah pada kuartal-kuartal selanjutnya dan baru mengalami lonjakan yang substansial pada kuartal terakhir.

Situasi realisasi anggaran pada institusi pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia menunjukkan karakteristik

yang serupa dengan yang diuraikan oleh Bank Dunia, yakni rendah pada periode awal tahun namun menumpuk secara signifikan di penghujung tahun. (Silalahi, 2021). Ketidakberhasilan dalam mencapai target anggaran mengakibatkan hilangnya potensi manfaat dari belanja yang direncanakan, sebab tidak semua dana yang telah dialokasikan berhasil digunakan secara efektif (terdapat dana yang tetap menganggur). Bila penerimaan anggaran gagal mencapai sasaran yang ditetapkan, hal ini mengindikasikan bahwa pengalokasian dana berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang rendah. (Ramdhani & Anisa, 2017). Kondisi serupa juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, persoalan ketidakseimbangan dalam penggunaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dapat diamati melalui realisasi anggaran periode 2019-2023.



Gambar 1. Persentase Penyerapan Anggaran

Pada peraturan menteri keuangan No. 258/ PMK.02/2015 tentang tata cara pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga tertuang pada pasal 3 ayat (2) bahwa “persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95 persen dengan demikian, persentase penyerapan anggaran belanja yang belum mencapai 95 persen dapat dianggap kurang optimal (Ramdhani & Anisa, 2017). Penyerapan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli

Utara menurun signifikan pada tahun 2020. Penyebabnya adalah adanya kebijakan pengalihan fokus dan pergeseran alokasi anggaran sesuai Permendagri No. 1 Tahun 2020 dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid-19, Pemerintah daerah mengutamakan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihian ekonomi nasional, termasuk optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Akibatnya, beberapa kegiatan prioritas tertunda sehingga penyerapan anggaran tidak mencapai target yang diharapkan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus berkonsentrasi untuk mencapai kinerja yang ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi realisasi anggaran belanja yang melenceng dari target yang telah ditentukan. Penyerapan anggaran adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program pemerintah, Penyerapan anggaran dianggap baik jika anggaran dapat direalisasikan sesuai dengan APBD (Lestari & Yuliani, 2022).

Dalam penelitian ini, salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat penyerapan anggaran adalah perencanaan. Perencanaan anggaran merupakan estimasi kinerja yang dirancang untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disajikan dalam bentuk keuangan. Dalam penganggaran, perencanaan menjadi pedoman proses membuat perkiraan penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan dana untuk jangka waktu tertentu. Proses ini mencakup memenuhi kebutuhan organisasi (prioritas), mengevaluasi kegiatan tahun sebelumnya, mematuhi peraturan, tiba pada waktunya (disiplin), berpartisipasi dalam proses, dan menyesuaikan diri dengan kesalahan administrasi. Agar program dan kegiatan di setiap OPD dapat berjalan lancar, perencanaan yang tepat sangat penting, Pencapaian penyerapan anggaran yang maksimal tidak akan terwujud tanpa

didukung oleh perencanaan anggaran yang matang.

Kendala yang umum terjadi dalam proses penganggaran antara lain adalah terlambatnya penggunaan dana atau pemanfaatannya yang belum maksimal, serta penyusunan rencana kegiatan yang kurang tepat dengan kebutuhan, akibat masih adanya asumsi bahwa tidak seluruh dana yang diajukan akan mendapat persetujuan. Akibatnya, anggaran yang diusulkan menjadi lebih besar dari kebutuhan sebenarnya tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan dan kemudahan pelaksanaannya. Perencanaan anggaran belanja belum berjalan secara maksimal, terlihat dari rendahnya realisasi penyerapan anggaran dan masih munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Kurangnya ketelitian dalam menyusun anggaran serta kurang tertibnya pelaksanaan kegiatan turut menyebabkan sejumlah program tidak dapat diselesaikan dengan baik. (Lestari & Yuliani, 2022).

Pelaksanaan anggaran merupakan pengelolaan keuangan yang dilakukan setelah tahap perencanaan anggaran. Pada tahap ini, berbagai tindakan dan upaya dilakukan untuk menerapkan semua rencana dan kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan sebelumnya. Proses pelaksanaan anggaran mencakup pengaturan penggunaan sarana yang dibutuhkan pihak yang bertanggung jawab melaksanakannya, metode pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta lokasi di mana kegiatan tersebut akan dijalankan, proses pelaksanaan anggaran berkaitan dengan proses pengajuan dan pembayaran yang dibebankan pada APBD, sehingga ketertiban administrasi menjadi aspek penting dalam implementasi anggaran. Kendala kerap muncul saat tahap pelaksanaan, yang menghambat jalannya program dan kegiatan sesuai rencana, sehingga memengaruhi ketepatan waktu dalam realisasi anggaran. (Salwah, 2019).

Pengadaan Barang dan Jasa adalah komponen tambahan yang memengaruhi

penyerapan anggaran. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan bagian penting dari proses pembangunan. Dalam ranah ekonomi, pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, yang mencakup penyediaan sarana seperti jalan, jembatan, serta infrastruktur di bidang telekomunikasi. Selain itu, Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk kegiatan pengadaan ini sehingga sering terjadi tindak korupsi mengenai pengadaan barang dan jasa. Perencanaan program yang buruk dan keterbukaan data menyebabkan korupsi pengadaan barang dan jasa.

KAJIAN LITERATUR/TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Landasan Teori

Teori Stewardship merupakan pendekatan yang berlandaskan pada perspektif psikologis dan sosiologis, yang menjelaskan bahwa seorang manajer (*steward*) cenderung mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Ketika terjadi perbedaan kepentingan antara steward dan pemilik, steward cenderung memilih untuk tetap menjalin kerja sama, karena ia memandang bahwa bertindak selaras dengan pemilik dan berkontribusi terhadap tercapainya tujuan organisasi merupakan pilihan yang rasional. (Sudaryo, 2017). Teori ini menekankan adanya korelasi yang kuat antara tingkat kepuasan pemilik dengan kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks pengelolaan pemerintahan, teori *stewardship* memberikan landasan konseptual yang relevan untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang lebih baik di tingkat pemerintah daerah. Masyarakat dalam hal ini diposisikan sebagai principal, sementara pemerintah berperan sebagai steward yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik secara

optimal, hemat sumber daya, dan transparan. Dengan begitu, peningkatan kinerja pemerintah daerah akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

2. Penyerapan Anggaran

(Halim, 2017:48) Menjelaskan bahwa anggaran pemerintah merupakan sebuah dokumen yang berisi perkiraan pendapatan, pengeluaran, dan kegiatan organisasi sebagai representasi kondisi keuangan serta rencana kerja di waktu yang akan datang. Khusaini (2019:6) mengungkapkan anggaran menjadi alat penting untuk mengelola kebutuhan masyarakat yang terus berkembang di tengah keterbatasan sumber daya. Anggaran dibutuhkan sebagai solusi atas keterbatasan sumber daya yang ada, Belanja Pemerintah berperan sebagai penggerak utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama pada program-program yang berdampak langsung pada kepentingan umum. Dengan menjalankan program lebih awal, dampak positif dan stimulasi yang dihasilkan akan semakin maksimal. Penundaan pelaksanaan hingga akhir tahun akan menyebabkan masyarakat paling merasakan kerugian akibat tertundanya manfaat yang seharusnya mereka dapatkan. Variabel Penyerapan Anggaran dapat diukur dengan menggunakan item kosioner (Silalahi, 2021) berikut : Penyerapan Anggaran

3. Perencanaan Anggaran

Silalahi (2021) menjelaskan Perencanaan merupakan suatu proses dalam menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk masa depan dengan mengambil serangkaian keputusan yang memperhitungkan ketersediaan sumber daya. Perencanaan meliputi penentuan tujuan organisasi, pengembangan strategi dan taktik yang tepat, serta implementasi proses yang memungkinkan pencapaian tujuan secara optimal. Proses perencanaan anggaran mencakup penentuan tujuan, pengembangan strategi pencapaian, dan

penyusunan rencana komprehensif untuk menyatukan serta mengatur berbagai aktivitas. Variabel Perencanaan Anggaran dapat diukur dengan menggunakan item kuesioner (Silalahi, 2021) berikut : (1) Keterlibatan (2) Ketepatan data (3) Penetapan APBD (4) Metode dan alat penyusunan anggaran (5) Penyusunan rencana dan kebutuhan

4. Pelaksanaan Anggaran

Menurut Dadang & Wiratmoko (2018:40) Proses pelaksanaan anggaran dimulai setelah APBD disahkan lewat PERDA pada akhir tahun, sebelum tahun anggaran yang baru dimulai. Tahapan ini berlangsung selama satu tahun, dimulai pada awal tahun anggaran baru pada bulan Januari. Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan rencana agar tidak tertunda. Anggaran yang telah ditetapkan tidak selalu dilaksanakan dengan baik karena ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Sekalipun rencana tersebut baik, namun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang mungkin timbul dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal atau sesuai dengan rencana sebelumnya, sehingga anggaran tidak dapat terealisasi tepat waktu. Variabel Pelaksanaan Anggaran dapat diukur dengan menggunakan item kuesioner (Silalahi, 2021) berikut: (1) Keselarasan dengan perencanaan (2) Efektivitas serta Efisiensi penggunaan dana (3) Kesesuaian dengan regulasi

5. Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Yumari (2017:18) Menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh entitas daerah yang dananya berasal dari APBD, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian seluruh proses pengadaan. Agus (2021:1) Pengadaan barang dan jasa pemerintah didefinisikan sebagai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat

daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Proses ini dimulai dengan menentukan kebutuhan dan berakhir dengan penyerahan hasil. Kuwat & Hermawan (2023:4) menjelaskan tujuan pengadaan barang dan jasa meliputi beberapa aspek penting. Pertama, Pengadaan dirancang untuk menghasilkan barang atau jasa yang tepat sesuai dengan nilai uang yang dibelanjakan, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti keunggulan, kapasitas, waktu pelaksanaan, harga, wilayah, dan penyedia. Kedua, pengadaan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi serta memperluas kesempatan berusaha. Ketiga, pengadaan berorientasi pada peningkatan keberlanjutan. Variabel Proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat diukur dengan menggunakan item kuesioner (Silalahi, 2021) berikut: (1) Panitian pengadaan barang dan jasa (2) Proses lelang.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode yang disusun secara sistematis, terarah, dan terorganisir dengan jelas mulai dari awal proses hingga tahap desain. Studi ini menganalisis hubungan antara dua kategori variabel, yakni variabel terikat berupa penyerapan anggaran dan tiga variabel bebas yang terdiri dari proses perencanaan anggaran, mekanisme pelaksanaan anggaran, serta prosedur pengadaan. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Tapanuli Utara.

Definisi Operasional Halim (2017) mendefinisikan penyerapan anggaran sebagai jumlah uang yang dikeluarkan oleh suatu organisasi Pada akhir periode anggaran, dilakukan perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan jumlah dana yang telah dialokasikan sebelumnya. Perencanaan anggaran merupakan tahap penyusunan rencana dan kebijakan bagi organisasi daerah, sedangkan pelaksanaan

anggaran adalah tahap penerapan rencana dan kebijakan tersebut. Proses pengadaan barang dan jasa meliputi serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian seluruh tahapan pengadaan. Dalam studi ini, sumber informasi utama berasal dari pengumpulan data langsung kepada partisipan tanpa melalui pihak ketiga, dengan mendistribusikan instrumen survei yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Staf/Pegawai pada Badan Keuangan Aset Daerah Tapanuli Utara. Dalam penelitian ini, sampel diambil dari populasi berdasarkan jumlah dan karakteristiknya.

Penelitian ini menerapkan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk mengamati nilai rata-rata, standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum guna menggambarkan karakteristik data. Kualitas data diuji melalui validitas dan reliabilitas. Validitas diuji dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, sedangkan reliabilitas diukur menggunakan nilai Cronbach's Alpha, di mana nilai di atas 0,60 dianggap menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik. Pengujian asumsi klasik mencakup pemeriksaan normalitas melalui plot probabilitas normal dan metode Kolmogorov-Smirnov; pengujian multikolinearitas, yang dilakukan dengan melihat nilai VIF di bawah 10 dan nilai toleransi di atas 0,1; dan pengujian heteroskedastisitas melalui plot dispersi. Untuk menganalisis dampak variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan analisis regresi linear berganda. Pengujian ini meliputi uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial, uji F untuk menguji pengaruh secara simultan, serta koefisien determinasi (adjusted R²) yang berfungsi mengukur besarnya kontribusi variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi yang dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disebarluaskan menunjukkan tingkat pengembalian yang sangat memuaskan, yakni mencapai 100%. Jawaban responden dikelompokkan berdasarkan skala penelitian yang diadaptasi dari (Sugiyono,2018), dengan kategori dari " Sangat Tidak Setuju" hingga "Sangat Setuju".

Tabel 1. Pengukuran Jawaban Responden

Keterangan	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Sejtu	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Anggaran	40	19	36	55	46,65	5,026
Pelaksanaan Anggaran	40	14	21	35	31,22	3,475
Proses Pengadaan Barang dan Jasa	40	10	25	35	31,10	2,799
Pengaruh Anggaran	40	7	18	25	21,95	1,974
Valid N (listwise)	40					

Sumber : Olah Data SPSS 26,2025

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel penelitian memiliki 40 observasi. Nilai analisis statistik pada varibel perencanaan anggaran memperlihatkan bahwa nilai minimal responden sebesar 36 dan nilai maksimal sebesar 55, sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 46,65 dengan standar deviasi sebesar 5,026. Hasil analisis statistik pada varibel pelaksanaan anggaran memperlihatkan bahwa nilai minimum responden sebesar 21 dan nilai maksimumnya sebesar 35 sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 31,22 dengan standar deviasi sebesar 3,475. Hasil

analisis statistik pada varibel proses pengadaan barang dan jasa memperlihatkan bahwa nilai minimum responden sebesar 25 dan nilai maksimumnya sebesar 35 sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 31,10 dengan standar deviasi sebesar 2,799. Hasil analisis statistik pada variabel penyerapan anggaran memperlihatkan bahwa nilai minimal responden sebesar 18 dan nilai maksimal sebesar 25, sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,95 dengan standar deviasi sebesar 1,974.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R _{Hitung}	R _{Tabel}	Ket.
Perencanaan Anggaran	X1.1	0,588	0,320	Valid
	X1.2	0,487	0,320	Valid
	X1.3	0,551	0,320	Valid
	X1.4	0,582	0,320	Valid
	X1.5	0,668	0,320	Valid
	X1.6	0,527	0,320	Valid
	X1.7	0,653	0,320	Valid
	X1.8	0,710	0,320	Valid
	X1.9	0,584	0,320	Valid
	X1.10	0,406	0,320	Valid
	X1.11	0,490	0,320	Valid
Pelaksanaan Anggaran	X2.1	0,745	0,320	Valid
	X2.2	0,808	0,320	Valid
	X2.3	0,743	0,320	Valid
	X2.4	0,803	0,320	Valid
	X2.5	0,762	0,320	Valid
	X2.6	0,829	0,320	Valid
	X2.7	0,681	0,320	Valid
Proses Pengadaan Barang dan Jasa	X3.1	0,778	0,320	Valid
	X3.2	0,702	0,320	Valid
	X3.3	0,674	0,320	Valid
	X3.4	0,528	0,320	Valid
	X3.5	0,645	0,320	Valid
	X3.6	0,465	0,320	Valid
	X3.7	0,572	0,320	Valid
Penyerapan Anggaran	Y.1	0,593	0,320	Valid
	Y.2	0,738	0,320	Valid
	Y.3	0,649	0,320	Valid
	Y.4	0,749	0,320	Valid
	Y.5	0,547	0,320	Valid

Sumber : Olah Data SPSS 26,2025

Berdasarkan tabel di atas, nilai r_{tabel} untuk penelitian ini ditentukan dengan menggunakan n=40, derajat kebebasan (df) = 38 (n-2), dan tingkat signifikansi 5%, yaitu sebesar 0,320. Dari tabel tersebut, koefisien korelasi pada setiap pernyataan dalam variabel menunjukkan nilai yang lebih besar dari r_{tabel} 0,320. Oleh karena itu, seluruh butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standar	Keterangan
Perencanaan Anggaran (X1)	0,782	0,60	Reliabel
Pelaksanaan Anggaran (X2)	0,882	0,60	Reliabel
Proses Pengadaan Barang dan Jasa (X3)	0,731	0,60	Reliabel
Penyerapan Anggaran (Y)	0,661	0,60	Reliabel

Sumber : Olah Data SPSS 26,2025

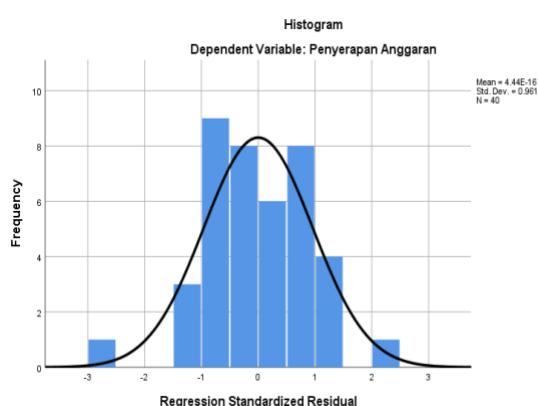
Pengujian reliabilitas diterapkan untuk mengevaluasi konsistensi respon partisipan terhadap item-item pernyataan dalam instrumen survei. Metode analisis yang digunakan adalah perhitungan koefisien cronbach's alpha, dimana suatu indikator pernyataan dalam instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai koefisien alpha >0,60 (Ghozali, 2018).

Tabel 5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}		.0000000
		Std. Deviation 1,45371389
Most Extreme Differences		Absolute .062
		Positive .060
		Negative -.062
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

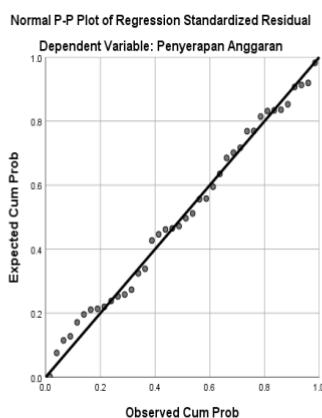
Sumber : Olah Data SPSS 26,2025

Berdasarkan tabel di atas, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) tercatat sebesar 0,200, yang lebih tinggi dari nilai alpha 0,05. Karena nilai signifikansi tersebut melebihi alpha (0,05), Dengan demikian, asumsi klasik mengenai uji normalitas dinyatakan terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan mengikuti distribusi normal.

**Gambar 3. Grafik Histogram**

Sumber : Olah Data SPSS 26,2025

Penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik, terlihat dari gambar histogram yang tidak condong ke kiri maupun ke kanan yang menunjukkan distribusi data normal.

**Gambar 4. Normal P-P Plot**

Model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan cocok untuk digunakan, dapat dilihat dari gambar diatas dimana titik-titik tersebar disekitar garis diagonal.

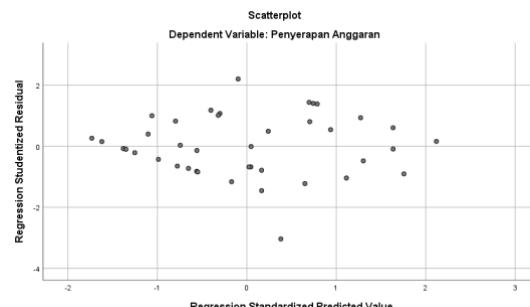
Tabel 6. Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a	
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Perencanaan Anggaran	.974	1.027
	Pelaksanaan Anggaran	.917	1.090
	Proses Pengadaan Barang dan Jasa	.896	1.116

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber : Olah Data SPSS 26,2025

Nilai tolerance untuk setiap variabel independen berada di atas 0,10, sementara nilai Variance Inflation Factor (VIF) berada di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari masalah multikolinearitas, yang berarti tidak terdapat korelasi antar variabel bebas, sehingga model tersebut layak untuk dianalisis lebih lanjut.

**Gambar 5. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas**

Grafik tersebut memperlihatkan pola sebaran titik-titik yang bersifat random dan terdistribusi merata, baik pada area di atas maupun di bawah nilai nol pada sumbu Y. Observasi ini mengkonfirmasi tidak adanya pola heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Temuan ini menegaskan bahwa model regresi dalam studi ini bebas dari masalah ketidaksamaan varians residual.

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	2.432	3.573		.681 .500
	Perencanaan Anggaran	.162	.049	.412	3.309 .002
	Pelaksanaan Anggaran	.161	.073	.283	2.208 .034
	Proses Pengadaan Barang dan Jasa	.224	.091	.317	2.447 .019

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber : Olah Data SPSS 26,2025

Koefisien regresi untuk perencanaan anggaran adalah 0,162, pelaksanaan anggaran adalah 0,161, dan

proses pengadaan barang dan jasa adalah 0,224. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan proses pengadaan barang/jasa memiliki dampak signifikan dan positif terhadap penyerapan anggaran belanja di Badan Keuangan dan Aset Daerah Tapanuli Utara. Faktor – faktor tersebut memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran dimana masing-masing aspek saling dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 8.Uji Parsial (Uji-t)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.432	3.573	.681	.500
	Perencanaan Anggaran	.162	.049	.412	3.309 .002
	Pelaksanaan Anggaran	.161	.073	.283	2.208 .034
	Proses Pengadaan Barang dan Jasa	.224	.091	.317	2.447 .019

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber : Olah Data SPSS 26,2025

Temuan penelitian ini memperkuat penerimaan hipotesis H1, yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini diperkuat oleh nilai t_{hitung} sebesar 3,309 dengan tingkat signifikansi 0,002. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,309 > 1,688$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$), serta koefisien regresi sebesar 0,162 yang bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Perencanaan Anggaran secara parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran (Y). Penyerapan anggaran dapat ditingkatkan melalui proses perencanaan anggaran yang efektif. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ramdhani & Anisa (2017)

Hasil Hipotesis H2 diterima yang menunjukkan bahwa peran pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan dan

positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini di dukung oleh t_{hitung} sebesar 2,208 dengan signifikansi 0,034. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,208 > 1,688$) atau sig lebih kecil dari 5% ($0,034 < 0,05$) dan nilai koefisien 0,161 yakni bernilai positif. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Pelaksanaan Anggaran berdampak signifikan dan positif pada penyerapan anggaran secara parsial (Y). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Malahayati (2015)

Hipotesis H3 diterima, dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 2,447 dengan tingkat signifikansi 0,019, yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2,447 > 1,688$) dan signifikansi yang lebih kecil dari 5% ($0,019 < 0,05$). Selain itu, koefisien sebesar 0,224 menunjukkan pengaruh positif. Dengan demikian, variabel Proses Pengadaan Barang dan Jasa secara parsial berkontribusi secara signifikan dan positif terhadap Penyerapan Anggaran (Y). Artinya, pelaksanaan proses pengadaan yang efektif sangat memengaruhi keberhasilan penyerapan anggaran belanja. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Ramadhani & Setiawan (2019)

Tabel 9. Uji Simultan (Uji-F)

Model	Sum of Squares		Mean Square	F	Sig.
	df				
1	Regress ion	69.482	3	23.161	10.11 .000 ^b
	Residua l	82.418	36	2.289	
	Total	151.900	39		

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran
b. Predictors: (Constant), Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran

Sumber : Olah Data SPSS 26,2025

Nilai F_{hitung} 10,117 dengan tingkat signifikansi 0,000 didukung, sementara nilai F_{tabel} 2,866 pada tingkat signifikansi 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas dalam penelitian ini memiliki pengaruh simultan yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa

F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($10,117 > 2,866$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Purwati et al., (2021).

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjust R2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.676 ^a	.457	.412	1.51307
a. Predictors: (Constant), Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran				
b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran				

Sumber : Olah Data SPSS 26,2025

Berdasarkan tabel di atas, nilai Adjusted R Square sebesar 0,412 menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan proses pengadaan barang dan jasa, mampu menjelaskan sekitar 41,2% variasi dalam penyerapan anggaran. Sementara itu, sebesar 58,8% variasi penyerapan anggaran dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari aspek Perencanaan Anggaran terhadap tingkat Penyerapan Anggaran
2. Dimensi Pelaksanaan Anggaran menunjukkan kontribusi yang positif dan signifikan dalam meningkatkan Penyerapan Anggaran
3. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas Penyerapan Anggaran
4. Secara simultan, ketiga variabel bebas tersebut memperlihatkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran

SARAN

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis pada data empiris serta kebutuhan nyata masyarakat guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih tepat sasaran. Optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa juga perlu dilakukan melalui penerapan sistem yang transparan dan akuntabel. Upaya tersebut harus didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur serta penguatan mekanisme pengawasan internal agar setiap tahapan dalam pengelolaan anggaran dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan berdampak positif terhadap percepatan pembangunan daerah.
2. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui forum-forum partisipatif seperti musrenbang, serta dengan memberikan masukan, kritik yang konstruktif, dan melakukan pengawasan sosial secara aktif. Partisipasi masyarakat yang informatif dan bertanggung jawab akan mendorong terwujudnya pengelolaan anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak positif terhadap pembangunan daerah.
3. penyerapan anggaran seperti kualitas sumber daya manusia dan lainnya. Peneliti selanjutnya juga bisa menambahkan variabel moderasi seperti Komitmen Organisasi karena memiliki potensi untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa dengan variabel dependen penyerapan anggaran. Peneliti berikutnya

dianjurkan untuk menggunakan sampel yang lebih besar guna memperoleh hasil yang lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Agus, p. (2021). *Pengadaan barang/jasa pemerintah (digital)*. Fokusmedia cv.
- Dadang suwanda, wiratmoko, y. P. S. (2018). *Reviu rencana kerja anggaran pemerintah daerah* (e. Kusnadi (ed.)). Pt remaja rosdakarya.
- Dr.yoyo sudaryo, d. Sjarif d. (2017). *Keuangan diera otonomi daerah* (putri kristian (ed.); 1st ed.).
- Halim, a. & k. (2017). *Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta, indonesia (ed.2). Salemba empat. [Https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=599&keywo rds=](Https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=599&keywords=)
- Kuwat slamet, h. Sukoasih. (2023). *Pengelolaan dan digitalisasi perpendaharaan negara* (p. Fotriandi (ed.)). Bumi aksara.
- Lestari, l., & yuliani laila, n. (2022). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,kualitas sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa dankomitmen organisasi terhadap penyerapan anggaranbelanja. *Business and economics conference in utilization of modern tchnology*, 1–16. <Https://journal.unimma.ac.id>
- Nurkholis khusaini. (2019). *Penganggaran sektor publik*. Ub press.
- Purwati, i., arisyahidin, a., & talkah, a. (2021). Analisis perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang jasa dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran di kabupaten kediri. *Otonomi*, 21(2), 244. <Https://doi.org/10.32503/otonomi.v21i2.2046>
- Ramadhani, r., & setiawan, m. A. (2019). Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/ jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada opd provinsi sumatera barat. *Jurnal eksplorasi akuntansi*, 1(2), 710–726. <Https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.104>
- Ramdhani, d., & anisa, i. Z. (2017). Pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah provinsi banten. *Jurnal riset akuntansi terpadu*, 10(1), 134–148. <Https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>
- Salwah, a. (2019). Pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap serapan anggaran satuan kerja perangkat daerah (skpd) pada pemerintah kota banda aceh1. *Jurnal emba*, 6(4), 164–182. <Https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/20913>
- Silalahi, m. H. F. (2021). Faktor - faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten tapanuli utara dengan komitmen organisasi dan motivasi sebagai variabel moderasi. *Tesis*, 1–197.
- Yumari, m. (2017). *Strategi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran* (mulyono da). Grup penerbitan cv budi utama.